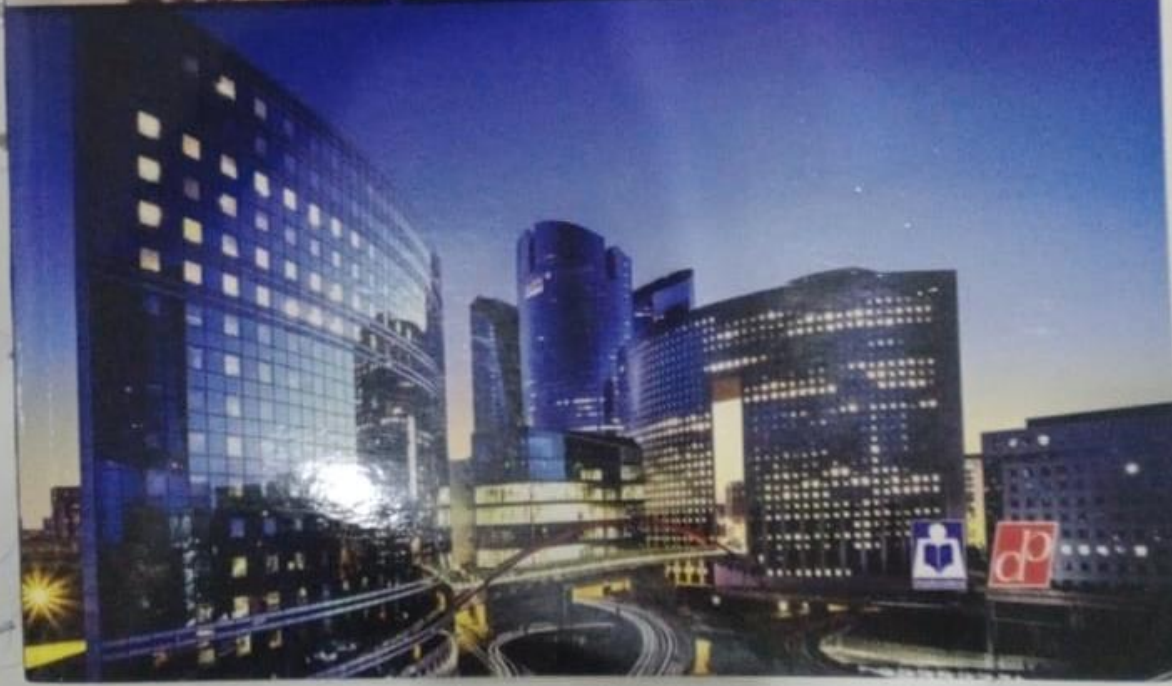


Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si
Dr. Muhamad Yamin Noch., SE., MSA
Heny Triastuti Kurnia Ningsih., SE., M.Si
Hamdani., SE., M.Si., Ak., CA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si
Dr. Muhamad Yamin Noch., SE., MSA
Heny Triastuti Kurnia Ningsih., SE., M.Si
Hamdani., SE., M.Si., Ak., CA

Editor:
Hotbin Hasugian

citapustaka media

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis: Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si, dkk.

Editor: Hotbin Hasugian

Copyright © 2015, Pada Penulis.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

Citapustaka Media

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung

Telp. (022) 82523903

E-mail: citapustaka@gmail.com

Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan Pertama: Maret 2015

ISBN 978-602-1317-71-6

Didistribusikan oleh:

CV. Madenatera Indonesia

Jl. Bromo Komplek Bromo Bisnis Center No. 43 Medan

E-mail: arf_79lbs@yahoo.com dan madenateranews@gmail.com

Contact person: 081370062009 - 081263529815

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
BAB 1 : GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	1
Pengertian dan ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik	1
Akuntansi Sektor Publik	7
Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	11
Peran Akuntansi Sektor Publik	12
Penggunaan Barang dan Jasa Publik	21
Rangkuman	23
Pertanyaan	24
BAB 2 : AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	26
Konsep Akuntansi Manajemen	26
Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan	28
Manfaat Akuntansi Manajemen Sektor Publik	30
Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik ..	31
Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik	34
Penentuan Tarif Pelayanan Publik	39
Dalil Terhadap Pembebanan Tarif Pelayanan	44
Rangkuman	46
Pertanyaan	46
BAB 3 : PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK	48
Pengertian Anggaran	48
Perkembangan Penganggaran	49
Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Sektor Publik	51
Anggaran Sektor Publik	51
Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik	54
Prinsip-Prinsip dalam Penganggaran Sektor Publik	56
Pendekatan Penganggaran Pada Sektor Publik	57
Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	65
Aspek Penganggaran Sektor Publik	68
Penganggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	71
Rangkuman	76
Pertanyaan	77
BAB 4 : PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	78
Teori Akuntansi	78
Konsep Teori Akuntansi	80
Teori dan Pembuat Kebijakan Akuntansi Sektor Publik	83
Pelaporan Keuangan Organisasi Sektor Publik	85

Prinsip Akuntansi Keuangan Sektor Publik	89
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik	90
Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	94
Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya	97
Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan	98
Rangkuman	99
Pertanyaan	100
BAB 5 : PENCATATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	101
Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik	101
Teknik Akuntansi Anggaran	101
Teknik Akuntansi Kas (<i>Cash Accounting</i>)	102
Teknik Akuntansi Akrual (<i>Accrual Accounting</i>)	108
Teknik Akuntansi Komitmen (<i>Commitment Accounting</i>)	115
Teknik Akuntansi Dana (<i>Fund Accounting</i>)	116
Teknik Akuntansi Kas Modifikasi	117
Rangkuman	123
Pertanyaan	125
BAB 6 : PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	126
Tujuan Pelaporan Keuangan	126
Basis Akuntansi	127
Periode Pelaporan	128
Jenis Laporan Keuangan	128
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	129
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	141
Hubungan Antar Komponen Laporan Keuangan	150
Rangkuman	151
Pertanyaan	151
BAB 7 : KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH	152
Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Daerah	152
Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Daerah	154
Azas-Azas Umum Pengelolaan Keuangan Negara	155
Regulasi Keuangan Negara dan Daerah	157
Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara	159
Format dan Fostur Keuangan Negara	162
Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Negara	167
Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	169
Pengorganisasian Keuangan Daerah	175
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	177
Perencanaan, Pelaksanaan dan Penetapan APBN dan APBD	178
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	180
Rangkuman	181
Pertanyaan	182
BAB 8 : BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH DAN BADAN USAHA LAYANAN UMUM	183
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	183
Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah	187

	Rangkuman	190
	Pertanyaan	191
BAB 9	: SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	192
	Pengertian dan Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	192
	Ruang Lingkup dan Karakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	193
	Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	197
	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	199
	Sistem Akuntansi Penerimaan Kas	201
	Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas	208
	Sistem Akuntansi Aktiva Tetap	214
	Sistem Akuntansi Selain Kas	217
	Rangkuman	221
	Pertanyaan	223
BAB 10	: STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	224
	Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan	224
	Penyusunan dan Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan	225
	Badan Penyusunan Standar Akuntansi Indonesia	225
	Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik	226
	Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia	227
	Isi Pokok Standar Akuntansi Pemerintahan	230
	Rangkuman	253
	Pertanyaan	254
BAB 11	: AUDITING SEKTOR PUBLIK	255
	Auditing Sektor Publik	255
	Audit Sektor Publik Dan Audit Sektor Swasta	257
	Jenis-Jenis Auditing Sektor Publik	258
	Jenis-Jenis Opini Audit	261
	Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Swasta	262
	Standar Auditing Sektor Publik	263
	Kewajiban Hukum Auditor	265
	Rangkuman	267
	Pertanyaan	268
BAB 12	: PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK	269
	Pengertian Kinerja Sektor Publik	269
	Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik	270
	Kendala dan Tantangan Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	271
	Indikator Kinerja Sektor Publik	273
	Syarat-Syarat Indikator Kinerja	273
	Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja	274
	Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja	274
	Peranan Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja	274
	<i>Value For Money</i> Sebagai Penilaian Kinerja Sektor Publik	275
	Pelaporan Kinerja	277
	Rangkuman	277
	Pertanyaan	278
DAFTAR PUSTAKA	279



BAB
1

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian dan ruang lingkup organisasi sektor publik
2. Akuntansi sektor publik
3. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik
4. Peran akuntansi sektor publik
5. Penggunaan barang dan jasa publik

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Pemahaman mengenai organisasi sektor publik dapat diketahui melalui pendekatan teori organisasi dalam sektor publik. Teori organisasi dalam sektor publik menganggap bahwa mustahil untuk memahami isi umum kebijakan dan pengambilan keputusan publik tanpa menganalisis cara pengaturan sistem politik, administratif dan modus operasinya. Sektor publik harus mempertimbangkan serangkaian norma dan nilai yang lebih luas dibandingkan dengan sektor privat dalam pengambilan keputusannya. Di antara faktor pertimbangan tersebut adalah pertimbangan demokrasi, nilai-nilai konstitusional dan kesejahteraan publik menjadi perhatian besar organisasi publik.

Pengertian Sektor Publik

Organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba (*profit*) sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi dan pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta. Istilah sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan sektor swasta.

"Pengertian mengenai organisasi sektor publik bisa jadi berbeda-beda berdasarkan cara pandang dari disiplin ilmu yang berbeda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Permasalahannya adalah bahwa kebutuhan publik beragam dan tak terbatas, sehingga diperlukan adanya prioritas kebijakan dan negosiasi publik untuk menyeleksi berbagai alternatif yang ada."¹

Organisasi sektor publik sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah

¹ Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi.

pusat maupun pemerintah daerah. Adapula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan mulai dari yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, yayasan yang bergerak di bidang sosial sampai dengan yayasan-yayasan yang bidangnya sangat khusus seperti beasiswa. Jika dilihat dari definisi dan peran sektor publik tersebut diatas, maka dengan kata lain sektor publik adalah *government* (pemerintah) yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi "kekuasaan" oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik yang berdasarkan hukum.

Arti Penting Sektor Publik

Tujuan organisasi publik memengaruhi misi, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas dan samar-samar, karena outputnya tidak seluruhnya dapat diukur secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada memaksimalkan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi bisnis. Pada sektor bisnis/swasta tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, sedangkan pada organisasi sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, penegakan hukum, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik seperti kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pada organisasi swasta lebih menekankan pada tujuan finansial daripada organisasi sektor publik. Dari segi proses dalam organisasi, sektor publik lebih bernuansa politis dibandingkan pada organisasi bisnis, sehingga pelaku di dalamnya juga dituntut memiliki kemampuan berpolitik selain kemampuan profesionalitas sebagaimana disektor swasta. Tujuan organisasi yang tidak jelas mengandung ketidakpastian yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya benturan kepentingan dalam interaksi sosial di lingkungan organisasi.² Dengan demikian, ada beberapa alasan mengapa sektor publik diperlukan, yaitu:³

1. Sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat maupun sektor sosial.
2. Sektor publik diperlukan sebagai regulator
3. Sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengembalian amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.

Masyarakat membutuhkan berbagai barang publik (*public goods*), sementara itu tidak ada pihak yang mau menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat tersebut selain pemerintah atau negara. Barang publik yang dibutuhkan masyarakat misalnya keamanan, kepolisian dan pengadilan. Sektor bisnis tidak mau menyediakan barang publik tersebut karena dua alasan utama yaitu tidak menguntungkan dan sangat besar biayanya. Sementara itu sektor sosial juga tidak mau menanganinya karena tidak mampu membiayainya dan bukan menjadi otoritasnya. Sektor sosial lebih bersifat sebagai pendukung negara dan bukan sebagai yang diberi mandat untuk penyediaan pelayanan publik yang mendi tanggungjawab negara.

Alasan lain diperlukannya sektor publik karena kebutuhan regulasi. Sektor bisnis perlu regulasi agar terjadi kompetisi yang sehat dan terhindar dari kegagalan pasar (*market failure*). Masyarakat perlu dilindungi dari perilaku merugikan para pelaku pasar.

Sektor publik juga diperlukan sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik memang dapat juga dilakukan oleh sektor privat terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang campuran yaitu barang semi privat dan semi publik, seperti layanan transportasi umum, pos dan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, air minum, jalan tol dan pertamanan.

² Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2013. Teori, Konsep dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

³ Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit UII Press.

Domain Organisasi Sektor Publik

Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Area organisasi sektor publik bahkan sering berubah-ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di suatu negara.

Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang *non-profit oriented*. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti *non-profit*. Anggapan itu kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe *quasi non-profit* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah, misalnya BUMN dan BUMD. Jadi perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi *nonprofit* dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan.

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapat negara lain yang diatur dengan hukum. Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain:

1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum
2. Bukan konsumsi individual
3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat
4. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

Jika dicermati dari batasan-batasan di atas, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi: instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, organisasi nirlaba milik swasta.

1. Instansi Pemerintah

Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Adapun Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah contohnya:

1. Perguruan Tinggi BHMN
2. Rumah Sakit milik pemerintah.
3. Yayasan-yayasan milik pemerintah.

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Konsep Akuntansi Manajemen
2. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan
3. Manfaat akuntansi manajemen sektor publik
4. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik
5. Peran akuntansi manajemen sektor publik
6. Penentuan tarif pelayanan publik
7. Dalil terhadap pembebanan tarif pelayanan

KONSEP AKUNTANSI MANAJEMEN

Pengertian Akuntansi Manajemen

Perkembangan yang pesat di bidang akuntansi manajemen pada tahun-tahun terakhir, mendorong para pakar dan teoritis akuntansi baik perorangan maupun badan akuntansi untuk merumuskan definisi akuntansi manajemen. *Management Accounting Practices (MAP) Comitte* yang dibentuk oleh *National Association of Accountants (NAA)* mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai berikut:

"Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi, serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawaban atas sumber-sumber tersebut."

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi manajemen dalam bentuk suatu pernyataan dalam *American Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)* sebagai berikut:

"Akuntansi Manajemen adalah penerapan teknik-teknik dan konsep-konsep yang tepat dalam pengolahan data ekonomi historis dan yang diproyeksikan dari suatu satuan usaha untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang rasional dan dalam membuat keputusan-keputusan rasional dengan suatu pandangan ke arah pencapaian tujuan tersebut".

Sedangkan *Institute of Management Accountant (IMA)* mendefinisikan akuntansi manajemen adalah:¹²

¹² *Institute of Management Accountants, 1981. Statements on Management Accounting IA: Definition of Management Accounting, National Association of Accountants, March 19.*

"suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel."

Akuntansi manajemen juga meliputi penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non manajemen seperti misalnya para pemegang saham, para kreditur, lembaga-lembaga pengaturan, pemerintah dan kantor pajak.

Jenis Informasi Akuntansi Manajemen

Informasi yang digunakan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan adalah informasi akuntansi manajemen dan merupakan informasi yang utama yang dimiliki perusahaan. Informasi akuntansi manajemen terutama digunakan oleh pimpinan perusahaan di dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen khususnya fungsi perencanaan dan pengawasan. Jenis-jenis informasi akuntansi manajemen adalah seperti berikut.

1. Akuntansi Biaya Penuh (*Full Cost Accounting*)

Akuntansi biaya penuh merupakan keseluruhan biaya yang dibebankan pada setiap produk, segmen dan devisi baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Pengertian biaya ini adalah keseluruhan biaya yang dapat ditelusuri manfaatnya pada produk yang bersangkutan, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya gabungan untuk memproduksi beberapa macam produk. Akuntansi biaya penuh dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu biaya penuh historis (*historical cost*) dan biaya penuh masa yang akan datang (*future estimate*). Biaya penuh historis terutama digunakan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan baik itu neraca maupun perubahan posisi keuangan. Di samping itu, biaya penuh juga digunakan untuk menilai prestasi manajer yang memimpin perusahaan, sedangkan biaya penuh masa yang akan datang terutama digunakan untuk semua tipe perencanaan baik itu perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek atau sering juga disebut pembuatan program yaitu keputusan tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Biaya penuh masa yang akan datang juga digunakan untuk menetapkan berapa harga penjualan normal yang dikehendaki perusahaan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Sebagai contoh, PDAM membeli komponen meteran air sebesar Rp. 15.000.000,- dan untuk merakit meteran air tersebut diperlukan biaya-biaya sebagai berikut: Upah tenaga kerja Rp. 2.000.000,- biaya material (suku cadang) sebesar Rp. 3.000.000,- serta biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (termasuk biaya tetap), maka biaya penuh dari meteran air tersebut adalah Rp. 25.000.000,-.

2. Akuntansi Biaya Diferensial (*Differential Accounting*)

Akuntansi biaya diferensial hanya digunakan untuk memilih salah satu alternatif dari alternatif yang ada untuk dijadikan menjadi keputusan perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi informasi yang digunakan dalam akuntansi diferensial adalah informasi masa mendatang (*future estimate*), dan informasi tersebut merupakan informasi mengenai perbedaan diantara alternatif yang dihadapi para pembuat keputusan. Jadi tidak ada informasi akuntansi diferensial yang bersifat historis.

Akuntansi diferensial dapat dibedakan menjadi empat yaitu biaya diferensial (*differential cost*), pendapatan diferensial (*differential revenue*), laba diferensial (*differential profit*), dan aktiva diferensial. Dari keempat akuntansi diferensial tersebut merupakan informasi masa yang akan datang yang berbeda pada suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Penentuan besarnya biaya, pendapatan, laba, dan aktiva diferensial hanya didasarkan pada prediksi masa yang akan datang. Sebagai contoh, PDAM membeli komponen meteran air dengan harga Rp. 15.000.000,- untuk merakit meteran air tersebut dibutuhkan biaya suku cadang sebesar Rp. 5.000.000,- dan upah tenaga kerja Rp. 3.000.000,-. Apabila dirakit oleh perusahaan lain, maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dari informasi tersebut dapat dibuat analisa tentang pemilihan merakit sendiri atau dirakit oleh perusahaan lain, yaitu sebagai berikut :

informasi kepada pihak internal, yaitu manajemen perusahaan. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi juga memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Di lain pihak, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Persamaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi keuangan

Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kesamaan, diantaranya yaitu:

1. Keduanya dibangun atas dasar pertanggungjawaban (*stewardship*). Manajemen sebagai wakil perusahaan harus mempertanggungjawabkan keuangan dan operasional perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkaitan dengan satuan-satuan pertanggungjawaban untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban yang lebih terinci.
2. Akuntansi keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum, tidak dalam suatu sistem yang terpisah. Selain karena penyelenggaraan dua sistem yang terpisah dilarang oleh pihak yang berwenang, hal tersebut juga akan sangat mahal untuk diimplementasikan karena memerlukan buku-buku akuntansi, waktu dan tenaga ekstra.

Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan

Berbagai perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dapat dilihat dari target pengguna, batasan input dan proses, target pengguna, batasan input dan proses, jenis informasi, orientasi waktu, tingkat agregasi, kedalaman, keakuratan vs tepat waktu, verifikasi dan relevansi seperti dirangkum dalam tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan

PERBEDAAN	AKUNTANSI MANAJEMEN	AKUNTANSI KEUANGAN
Target pengguna	Berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna internal	Berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna eksternal
Batasan input dan proses	Tidak terikat aturan tertentu	Pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Bapepam & IAI di Indonesia)
Target pengguna	Berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna internal	Berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna eksternal
Batasan input dan proses	Tidak terikat aturan tertentu	Pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Bapepam & IAI di Indonesia)
Jenis informasi	Informasi keuangan & non keuangan, dimungkinkan juga informasi yang bersifat subjektif	Informasi keuangan yang bersifat objektif
Orientasi Waktu	Menekankan pada informasi tentang peristiwa di masa depan	Mencatat dan melaporkan peristiwa yang sudah terjadi (data historis)
Tingkat Agregasi	Evaluasi internal dan pembuatan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang sangat detail	Informasi yang disediakan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan
Kedalaman	Melibatkan aspek ekonomi manajerial, teknik industri dan ilmu manajemen (bersifat multi-disipliner)	Lebih spesifik

Sementara organisasi sektor publik bersifat non laba, dan adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendalinya lebih banyak yang berupa peraturan birokrasi. Pengukuran kinerjanya menggunakan *Value for Money* (3E), sehingga pengukuran kinerja disini terutama dalam ukuran moneter.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alternatif pengendalian yang vital bagi organisasi karena bersifat kuantitatif, dinyatakan dalam ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang akhirnya dapat membantu gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian dibedakan penggunaan informasi sebagai alat pengendalian keuangan, dan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan, dan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistim aliran uang dalam organisasi, untuk memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik, serta sebagai alat akuntabilitas penggunaan sumber daya.

Sementara pengendalian organisasi terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistim organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Pengendalian organisasi membutuhkan tidak hanya informasi keuangan, tetapi membutuhkan informasi luas yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang ditujukan.

Pada organisasi sektor publik sifatnya cenderung tidak mengejar laba dan dipengaruhi politik yang besar, sehingga alat pengendaliannya lebih banyak berupa aturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian karena informasi yang diberikan bersifat kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kerja secara keseluruhan.

Informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi secara menyeluruh. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistim aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Pengendalian organisasi terkait pengintegrasian aktifitas fungsional ke dalam sistim organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan.¹³

PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri atas aktivitas formal, meliputi:

1. Perumusan strategi
2. Perencanaan strategi
3. Penganggaran
4. Pelaksanaan
5. Evaluasi kinerja

¹³ Mardiasmo, op. cit. hal. 34-35.



PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Tujuan Pelaporan Keuangan
2. Basis Akuntansi
3. Periode Pelaporan
4. Jenis Laporan Keuangan
5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
6. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPD)
7. Hubungan antar komponen laporan keuangan

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif,



KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dan daerah
2. Ruang lingkup keuangan negara dan daerah
3. Azas-azas umum pengelolaan keuangan negara
4. Regulasi keuangan negara dan daerah
5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
6. Kelembagaan pengelolaan keuangan negara
7. Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah
8. Pengorganisasian keuangan daerah
9. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah
10. Perencanaan, pelaksanaan dan penetapan APBN dan APBD
11. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah

Undang-undang (UU) Keuangan Negara diharapkan memberikan arahan umum terhadap pengelolaan keuangan negara dalam setiap tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah serta berbagai unit pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah, yang meliputi departemen, lembaga non departemen dan badan usaha milik negara/daerah. Lebih daripada itu, UU Keuangan Negara diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan sistem keuangan antar setiap elemen/komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Sesuai amanat dari UUD 1945, UU Keuangan Negara ini diharapkan menjadi payung bagi setiap undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di pusat maupun di daerah, walaupun dalam ketentuan hukum, kedudukan setiap undang-undang itu setara.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah. Pengertian Keuangan Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

"Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan "hak milik negara" berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pentingnya standar akuntansi pemerintahan
2. Penyusunan dan penetapan standar akuntansi pemerintahan
3. Badan penyusunan standar akuntansi Indonesia
4. Standar internasional akuntansi sektor publik
5. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia
6. Isi pokok standar akuntansi pemerintahan

PENTINGNYA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersial yang dipelopori dengan dikeluarkannya SAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan juga dipaksa mengikutinya. Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (*hearing*), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pada tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dan menjadi tonggak awal Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, 2005.** *Auditing and Assurance Service*, Pearson Prentice Hall, New Jersey. hlm. 1.
- Bastian, Indra, 2001.** *Akuntansi Sektor Publik*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE) Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan 1, November.
- Chariri, Anis dan Ghozali Imam, 2001.** *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, 2003.** Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. hlm 3-17
- Glynn, J. J. 1993.** *Public Sector Financial Control and Accounting*. 2nd Ed. Oxford: Blackwell.
- Halim, Abdul., dan Syam Kusufi. 2013.** *Teori, Konsep dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2011.** *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. hal. 77
- Harry I Wolk, Jere R. Francis dan Michael Tearmney: Accounting Theory, a conceptual and Institutional Approach**, hal. 8
- Ikhsan., Arfan. 2010.** *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan., Muhyarsyah, Rasdianto. 2013.** *Teori Akuntansi*. Penerbit Citapustaka.
- Institute of Management Accountants, 1981.** *Statetments on Management Accounting IA: Definition of Management Accounting*, National Association of Accountants, March 19.
- Iswari, D A A Ratih. 2011.** *Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan Non-Finansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar*. Tesis program pascasarjana Universitas udayana. Tidak terpublikasi.
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2000.** *Public Sector Accounting*. Edisi Kelima Prentice Hall.
- Kam, Vernon. 1986.** *Accounting Theory*, New York: John Wiley & Sons. hal. 34
- Lembaga Administrasi Negara dan BPK. 2000.** *Akuntabilitas dan good governance*, modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- Mahmudi, 2011.** *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit UII Press.
- Mardiasmo, 2009.** *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Murwanto Rahmadi, Adi Budiarmo dan Fajar Hasri Ramadhana, Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.** Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pelatihan dan Keuangan Depertemen Keuangan RI. hlm 18-23
- Narsa, I Made, 2007.** *Struktur Meta Teori Akuntansi Keuangan (Sebuah Telaah dan Perbandingan antara FASB dan IASC)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 9, No. 2, Nopember: 43-51.
- Neely, Andi. 2004.** *The Challenges of Performance Measurement*. *Management Decision* (2004) Vol. 42 No. 8, pp. 1017-1023. © Emerald Group Publishing Limited
- Nordiawan, Deddi., dan Ayuningtyas Hertianti. 2010.** *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

- Oentarto, dkk. 2004.** *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Premchand, A. 1989.** *Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice*, IMF.
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2010.** *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Salamun, Slamet, 2007.** *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Menurut PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006)*. Diedit oleh Abdul Halim dan Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ulum, Ihyaul MD, 2008.** *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Penerbit UMM Press .hlm : 100.

